

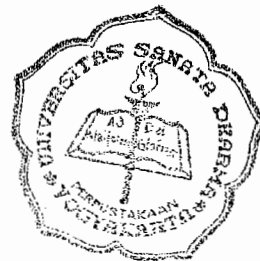
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEKTOR PUBLIK**  
**Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**Mita Yuwanti**

**NIM: 022114049**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**YOGYAKARTA**  
**2006**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEKTOR PUBLIK  
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Oleh:

Mita Yuwanti

NIM: 022114049

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



**Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto Akt., M.Si.**

Tanggal, 8 Agustus 2006

Pembimbing II



**Firma Sulistiyowati, SE., M.Si.**

Tanggal, 30 Agustus 2006

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEKTOR PUBLIK**

**Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

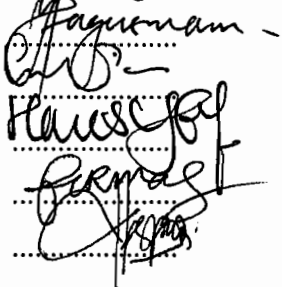
Mita Yuwanti  
NIM: 022114049

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 26 September 2006  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

|            | Nama Lengkap                                |
|------------|---|
| Ketua      | Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.  |
| Sekretaris | Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.            |
| Anggota    | Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto Akt., M.Si. |
| Anggota    | Firma Sulistiyowati, SE., M.Si.             |
| Anggota    | Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.           |

Tanda tangan

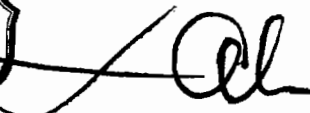


Yogyakarta, 30 September 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



  
Alex Kahu Lantum, M.S.)

*Do all the goods you can, All the best you can, In all times you can, In all places you can, For all the creatures you can.*

*Pengetahuan ada dua macam : yang telah kita ketahui dengan sendirinya atau yang hanya kita ketahui dimana ia bisa didapatkan. - Samuel Johnson*

Banyak kata terimakasih yang ingin diucapkan atas dukungan dari orang-orang yang berada disekitarku walaupun aku tahu ucapan terimakasih itu saja tidak cukup. Melalui halaman ini aku ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

*Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria tercinta,  
Bapak-Ibuku, kakak, adik-adikku, Katri Sri Widodo  
teman-teman kerja yang telah mengajarku dan membimbing aku agar terus  
semangat dan memberikan yang terbaik untuk skripsi ini  
dan semua teman-temanku dari A sampai Z I love you guys....*

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagai layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 September 2006



Penulis

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Mita Yuwanti  
022114049  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2006**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kinerja Pendapatan dan Belanja APBD serta menilai perkembangan trend kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat kemandirian daerah, varian indikator kinerja pendapatan, dan varian indikator kinerja belanja serta membuat *trend* perkembangan kinerja pemerintah Daerah.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta bersifat *konsultatif* yang berarti peran pemerintah pusat atau propinsi sudah mulai berkurang. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 bagus karena varian indikator kinerja pendapatan diatas 100%. Kinerja Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 bagus karena varian indikator kinerja belanja dibawah 100%. Garis *trend* pertumbuhan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta cenderung naik. Kenaikkan ini berarti kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin baik atau semakin mandiri. Garis *trend* kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta cenderung menurun. Penurunan menandakan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun-tahun selanjutnya tidak baik.

## **ABSTRACT**

### **AN ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR**

A Case Study at the Yogyakarta Municipality Government

**Mita Yuwanti**

**022114049**

**Universitas Sanata Dharma**

**Yogyakarta**

**2006**

This study attempted to measure the level of self-sufficiency of the Yogyakarta government's Local Budget (APBD) and to evaluate the development of the trends of its financial performance for the fiscal year of 2001-2004. The research was a case study at Yogyakarta Municipality Government. The data collecting technique was documentation.

The data analysis techniques were analysis of the level of local self-sufficiency; the variance of revenue performance indicator; variance of expenditure performance indicator; and development trend of the local government's performance.

Based on the analysis of the data gathered, this study concluded that the level of self-sufficiency of the Yogyakarta municipality government was consultative. It meant that the role of the central and provincial governments began to decrease. At

the same time, this study argues that the performance of the Yogyakarta municipality government's income performance for the fiscal year 2001-2004 was good. This was because the variance of performance indicator was over 100%. Meanwhile, the performance of Yogyakarta municipality government's expenditure was also good, because it was below 100%. The Yogyakarta municipality government's growth line trend of self-sufficiency tend to rise. This meant the self-sufficiency of the government was getting better each year. On the other hand, the trend line of the government's income tend to go down. This indicated that the income performance of the government will not be good for the next years.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagaimana mestinya, dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Tahun 2001–2004.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Universitas Sanata Dharma. Penelitian dalam skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta apakah dapat dikatakan mandiri dan bagus.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah menyediakan fasilitas dan hal-hal lain yang mendukung dari awal kuliah sampai penulis mendapat gelar sarjana.
2. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, Akt., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E. M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan yang berarti bagi skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu, karyawan/i Pemerintah Kota Yogyakarta yang selalu tersenyum dan bersedia meluangkan waktunya serta membantu dalam mendapatkan data serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

5. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan materi dan moril hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kakak dan adik-adikku yang dengan sabar dan penuh kasih memberikan bantuan, semangat dan doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Katri Sri Widodo yang dengan sabar mendengarkan dan memberi semangat agar selalu maju dan pantang menyerah.
8. Teman-teman MPT (Anin, Gatot, Yudha, Hendra, Era, Tutik, Reni, Apriliani, Tommy, Andy, Martini) terimakasih untuk saran dan masukan yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 30 September 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                  | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....             | iii     |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | iv      |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....      | v       |
| ABSTRAK .....                        | vi      |
| <i>ABSTRACT</i> .....                | vii     |
| KATA PENGANTAR .....                 | ix      |
| DAFTAR ISI .....                     | xi      |
| DAFTAR TABEL .....                   | xiii    |
| DAFTAR GRAFIK .....                  | xiv     |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....      | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....             | 3       |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 4       |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 4       |
| E. Sistematika Penulisan .....       | 5       |
| BAB II LANDASAN TEORI .....          | 7       |
| A. <i>Good Governance</i> .....      | 7       |
| B. Akuntansi Keuangan Daerah .....   | 8       |
| C. Laporan Keuangan Daerah .....     | 12      |
| D. Laporan Perhitungan APBD .....    | 15      |
| E. Analisis <i>Trend</i> .....       | 24      |
| F. Review Penelitian .....           | 26      |
| BAB III METODA PENELITIAN .....      | 27      |
| A. Jenis Penelitian .....            | 27      |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian ..... | 27      |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....     | 27      |

|   |    |
|---|----|
| D. Populasi dan Sampel .....                            | 27 |
| E. Teknik Analisis Data .....                           | 28 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM .....                              | 31 |
| A. Sejarah Pembentukan Pemerintah Kota Yogyakarta ..... | 31 |
| B. Letak Geografis dan Luas Wilayah .....               | 35 |
| C. Penduduk dan Tenaga Kerja .....                      | 37 |
| D. Hasil Utama Daerah .....                             | 39 |
| E. Sosial .....   | 40 |
| F. Organisasi Pemerintahan Daerah .....                 | 41 |
| BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....                | 44 |
| A. Analisis Data .....                                  | 44 |
| 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta .....    | 44 |
| 2. Analisis <i>Trend</i> .....                          | 49 |
| B. Pembahasan .....                                     | 51 |
| BAB VI PENUTUP .....                                    | 56 |
| A. Kesimpulan .....                                     | 56 |
| B. Keterbatasan Penelitian .....                        | 57 |
| C. Saran .....  | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN  |    |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel II.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....   | 21      |
| Tabel III.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....  | 28      |
| Tabel IV.1 Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan,<br>Kelurahan dan Luas .....   | 36      |
| Tabel IV.2 Distribusi Frekuensi Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan<br>Kecamatan .....   | 38      |
| Tabel IV.3 Hasil Utama Daerah .....   | 39      |
| Tabel V.1 Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun<br>2001-2004 .....   | 45      |
| Tabel V.2 Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-<br>2004 .....   | 46      |
| Tabel V.3 Perhitungan Varian Indikator Kinerja Belanja Rutin dan<br>Belanja Pembangunan pada Tahun 2001 dan 2002 .....                | 48      |
| Tabel V.4 Perhitungan Varian Indikator Kinerja Belanja Aparatur Daerah<br>dan Belanja Pelayanan Publik pada Tahun 2003 dan 2004 ..... | 48      |
| Tabel V.5 <i>Trend</i> Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta<br>Tahun 2001-2004 .....  | 49      |
| Tabel V.6 <i>Trend</i> Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun<br>2001-2004 .....   | 50      |

## DAFTAR GRAFIK

|   | Halaman |
|---|---------|
| Grafik V.1 <i>Trend</i> Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun<br>2001-2004 ..... | 50      |
| Grafik V.2 <i>Trend</i> Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun<br>2001-2004 .....  | 51      |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan *good governance* dalam rangka membentuk Indonesia baru. Dilaksanakannya reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk itu diperlukan pemahaman yang komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan adanya reformasi tersebut maka pemerintah mengeluarkan 2 undang-undang yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada organisasi Pemerintah Daerah, laporan keuangan yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pada pasal 81 ayat (1) meliputi Laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, Neraca dan Nota Perhitungan APBD. Pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada Laporan Perhitungan APBD.

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data anggaran sebagai salah satu laporan keuangan daerah memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi baik penerimaan maupun pengeluaran. Analisis terhadap anggaran daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengeluaran keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Fungsi anggaran salah satunya juga untuk membantu manajemen pemerintah dalam pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja unit di bawahnya.

Pendapatan Daerah diperoleh dari dua sumber yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan yang berasal dari bantuan atau sumbangan Pemerintah Pusat atau propinsi. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan mandiri sepenuhnya apabila pengeluaran daerah dapat dibiayai dengan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Apabila Pemerintah Kota Yogyakarta masih membutuhkan bantuan atau pinjaman dari Pemerintah Pusat atau Propinsi bukan berarti Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mandiri. Besar bantuan dan pinjaman dari Pemerintah Pusat atau propinsi menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Ketergantungan Pemerintah Kota dengan Pemerintah Pusat atau Propinsi dapat dilihat dari Pola Hubungannya. Pola Hubungan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat atau Propinsi dapat dilihat dari persentase tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.



Dengan Laporan Perhitungan APBD kita dapat menganalisis kinerja pendapatan dan belanja APBD. Penilaian kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menunjukkan varian atau perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah yang telah dibuat berdasarkan tujuan, sasaran, misi dan visi Pemerintah Kota Yogyakarta. Penilaian kinerja Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menunjukkan varian atau perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah yang telah dibuat berdasarkan tujuan, sasaran, misi dan visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Analisis terhadap tingkat kemandirian, kinerja pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun dapat menunjukkan bagaimana perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari perkembangan kinerja keuangan tersebut dapat diketahui kenaikan atau penurunan kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Data anggaran sebagai salah satu laporan keuangan daerah memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi baik penerimaan maupun pengeluaran. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004 ditinjau dari tingkat kemandirian daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004 ditinjau dari kinerja pendapatan dan belanja daerah?

3. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001-2004?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004.
2. Untuk mengetahui kinerja pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004.
3. Untuk mengetahui perkembangan *trend* kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengukuran kinerja laporan keuangan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan wawasan bagi kepastakaan di Universitas Sanata Dharma.

3. Bagi Penulis

Memperoleh gambaran yang jelas bagaimana kinerja pendapatan dan belanja dalam APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang pentingnya analisis kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya APBD. Analisis terhadap anggaran daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengeluaran keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Fungsi anggaran salah satunya juga untuk membantu manajemen pemerintah dalam pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja unit dibawahnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kinerja pendapatan dan belanja serta mengetahui perkembangan *trend* kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh.

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan penulis meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang keadaan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi sejarah pembentukan, letak geografis dan luas wilayah, penduduk dan tenaga kerja, hasil utama daerah, sosial dan organisasi pemerintah daerah.

#### **BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode dan teknik yang diuraikan dalam metode penelitian.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh langkah-langkah dalam pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian ini dan peneliti selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2002: 18) *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

*United Nation Development Program* (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

##### 1. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

##### 2. *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

##### 3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkannya.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency and effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic vision*

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

**B. Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi

ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi (Halim, 2004: 34).

Menurut Halim (2004: 30) yang dimaksud dengan akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut sebagai *stakeholders* yang meliputi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

2. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Investor, Kreditor dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.

4. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah adalah pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisinya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM dan lain-lain.

5. Rakyat (Publik)

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk dan jasa dari Pemerintah Daerah. Dalam buku Mardiasmo (2002: 171) pada dasarnya rakyat atau biasa disebut sebagai masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu:

a) Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:

- 1) Mengetahui kebijakan pemerintah
- 2) Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
- 3) Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu



- b) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
- c) Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*)

#### 6. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

#### 7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) lain

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Halim (2004: 18) dalam bukunya menyebutkan bahwa dari definisi tersebut terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.

2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

### **C. Laporan Keuangan Daerah**

Laporan Keuangan Daerah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Tuntutan yang semakin besar untuk melaksanakan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi pihak eksekutif daerah (Pemda) untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah (yang diwujudkan dalam APBD) kepada pemakai informasi, terutama pihak legislatif (DPRD) dan masyarakat yang telah memberi amanah bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan publik (MEP, 2003: 1). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2004: 148).

Laporan Keuangan Daerah yang disusun harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya. Dalam konteks ini, para pihak pengguna sendiri dituntut memiliki kemampuan pemahaman tentang akuntansi dan informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan. Dengan demikian, sama sekali tidak berarti bahwa informasi akuntansi harus dapat dimengerti oleh setiap orang.
2. Relevan, artinya penyajian informasi keuangan harus sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Informasi yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya adalah tidak relevan dan tidak ada gunanya.
3. Andal, artinya informasi keuangan memiliki kualitas andal yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau diharapkan dapat disajikan secara wajar.
4. Dapat diperbandingkan, artinya informasi keuangan suatu daerah harus dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan periode sebelumnya dalam daerah yang sama, dan dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan daerah lain dalam periode yang sama.

Halim (2004: 17) dalam bukunya menyebutkan tujuan dan fungsi Laporan Keuangan Daerah yaitu:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan Keuangan untuk memberikan jaminan kepada pengguna Laporan Keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan Keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Efisiensi yaitu membandingkan antara input yang digunakan dengan berapa output yang dihasilkan, sedangkan efektif berarti membandingkan antara berapa output yang telah dicapai dengan outcome atau dampak yang dihasilkan dari pencapaian output tersebut.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan memberi dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan dapat membantu pembaca laporan keuangan (pemakai laporan keuangan) dalam mengambil keputusan atau menentukan apakah suatu unit kerja atau organisasi dapat menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang telah dipengaruhi, karyawan dan masyarakat.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

#### **D. Laporan Perhitungan APBD**

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2004:

15). Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Laporan perhitungan APBD adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode (Bastian, 2003: 181).

Di era pra reformasi bentuk dan susunan laporan APBD mengalami perubahan 2 kali. Susunan APBD mula-mula (berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1975) terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Anggaran Rutin tersebut dibagi lebih lanjut menjadi Pendapatan Rutin dan Belanja Rutin, demikian pula Anggaran Pembangunan dibagi lebih lanjut menjadi Pendapatan dan Belanja Pembangunan. Susunan demikian kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988. Dengan peraturan tersebut susunan dan bentuk APBD tidak lagi terbagi atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan namun terbagi atas Pendapatan dan Belanja. Selanjutnya

Pendapatan terbagi lagi menjadi Pendapatan dari Daerah, Penerimaan Pembangunan dan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP). Belanja juga dirinci lebih lanjut menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja Rutin diklasifikasikan atas 10 bagian dan Belanja Pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor (termasuk Subsidi Kepada Daerah Bawahan, Pembayaran Kembali Pinjaman dan UKP).

Perubahan kedua di era pra reformasi terjadi pada tahun 1998 yaitu pada bagian Pendapatan dari Daerah. Perubahan yang terjadi adalah pada klasifikasinya. Jika pada bentuk sebelumnya Pendapatan dari Daerah terbagi menjadi 4 yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, dan Sumbangan dan Bantuan, maka pada bentuk yang baru Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Sumbangan/ Bantuan menjadi satu bagian. Bagian tersebut bernama Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi.

Di era (pasca) reformasi bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru,

APBD terdiri atas 3 bagian yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra reformasi. Adanya pos Pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas daerah. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Struktur anggaran pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis Pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan. Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Struktur Anggaran Belanja Daerah menurut bagian Belanja terdiri atas Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik. Setiap Bagian Belanja dirinci menurut kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan belanja Tidak Tersangka.



Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek. Setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja. Struktur Pembiayaan dirinci menurut kelompok pembiayaan yang meliputi sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Setiap kelompok pembiayaan dirinci menurut jenis pembiayaan. Setiap jenis pembiayaan dirinci menurut obyek pembiayaan. Setiap obyek pembiayaan dirinci menurut rincian obyek pembiayaan (MEP UGM, 2003: 3-4).

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain yaitu bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2004: 150). Rasio kemandirian dapat ditunjukkan dengan rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian

pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Menurut Halim (2004: 189) secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain:

- a. Pola hubungan *Instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan *Konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan *Partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- d. Pola hubungan *Delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

| <b>Kemampuan Keuangan</b> | <b>Kemandirian (%)</b> | <b>Pola Hubungan</b> |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Rendah sekali             | 0 % - 25 %             | <i>Instruktif</i>    |
| Rendah                    | 25 % - 50 %            | <i>Konsultatif</i>   |
| Sedang                    | 50 % - 75 %            | <i>Partisipatif</i>  |
| Tinggi                    | 75 % - 100 %           | <i>Delegatif</i>     |

Sumber: Halim, 2004: 189

## 2. Pendapatan Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan Pendapatan adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas daerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah adalah:

- 1) Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan pajak.
- 2) Retribusi Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
- 3) Bagian Laba Usaha Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan dari PAD yang bukan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan dibagi menurut jenisnya:

- 1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- 2) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

3) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatannya untuk suatu tujuan tertentu atau khusus, misalnya: DAK untuk reboisasi, DAK untuk bidang-bidang tertentu.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi PAD dan Dana Perimbangan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Kinerja Pendapatan Daerah perlu dievaluasi karena baik buruknya kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Pendapatan (Bastian, 2003: 56). Menurut Mardiasmo (2002: 303–304) kinerja Pendapatan dapat diukur dengan varian indikator kinerja pendapatan yaitu membandingkan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%. Jika realisasi sama atau lebih dari 100% maka kinerja pendapatan disebut bagus dan jika realisasi kurang dari 100% maka kinerja pendapatan disebut tidak bagus. Varian indikator kinerja pendapatan ditunjukkan dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

### 3. Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Belanja Daerah dirinci menurut kelompok belanja yaitu:

- a. Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar dinikmati oleh aparatur pemerintah atau tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat atau publik.
- b. Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar (secara langsung) dinikmati oleh masyarakat atau publik.

Mardiasmo (2002: 303–304) menyebutkan bahwa Kinerja Belanja dapat diukur dengan varian indikator kinerja belanja yaitu membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dikalikan 100%. Jika realisasi kurang atau sama dengan 100% maka kinerja belanja disebut bagus dan jika realisasi lebih dari 100% maka kinerja belanja disebut tidak bagus. Varian indikator kinerja belanja ditunjukkan dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

#### E. Analisis Trend

*Trend* adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata (*smooth*) (Suharyadi dan Purwanto, 2003: 114). Untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja Pemerintah Daerah Kota



Yogyakarta penulis membuat *trend*, varians-variens yang akan dibuat *trend* adalah:

1. *Trend* Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta

*Trend* tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta dihitung dari rasio kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta. Apabila *trend* tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun semakin tinggi maka *trend* tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta semakin baik karena itu berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemerintah pusat atau propinsi semakin rendah. Apabila *trend* tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun turun maka *trend* tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta semakin buruk karena itu berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemerintah pusat atau propinsi semakin tinggi

2. *Trend* Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta

Varian kinerja pendapatan menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah. *Trend* kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta dihitung dari varian kinerja pendapatan. Apabila *trend* kinerja pendapatan diatas 100% dan dari tahun ke tahun semakin bertambah maka pertumbuhan kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta bagus. Apabila *trend* kinerja pendapatan dibawah 100%

maka pertumbuhan kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bagus.

#### **F. Review Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Neil Yulia tentang Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Propinsi Riau 1997/1998-2001. Penelitian tersebut menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tahun dasar 1997/1998–2001, alat analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi sektor, analisis laju pertumbuhan, analisis derajat desentralisasi fiskal, tabungan daerah dan varian indikator kinerja pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Pada penelitian ini penulis akan mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya APBD pada tahun 2001–2004, menggunakan alat analisis tingkat kemandirian daerah, varian indikator kinerja pendapatan, dan varian indikator kinerja belanja serta membuat *trend* perkembangan kinerja pemerintah Daerah sehingga akan dapat dilihat bagaimana kinerja pemerintah daerah dari tahun ketahun semakin baik atau semakin buruk.



## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2006, sedangkan tempat penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik dokumentasi, data yang dikumpulkan dalam dokumentasi ini adalah:

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Laporan perhitungan APBD tahun 2001-2004

#### **D. Populasi dan Sampel**

Data yang diteliti adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Laporan Perhitungan APBD. Sampel yang digunakan adalah data laporan keuangan perhitungan APBD pada tahun 2001–2004.

### E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung tingkat kemandirian daerah adalah dengan:
  - a. Membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman dengan menggunakan rumus rasio kemandirian:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

- b. Menarik kesimpulan dari hasil rasio kemandirian tersebut, dengan berpedoman pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah:

**Tabel III. 1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan       |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| Rendah sekali      | 0 % - 25 %      | <i>Instruktif</i>   |
| Rendah             | 25 % - 50 %     | <i>Konsultatif</i>  |
| Sedang             | 50 % - 75 %     | <i>Partisipatif</i> |
| Tinggi             | 75 % - 100 %    | <i>Delegatif</i>    |

Sumber: Halim, 2004: 189

Apabila hasil persentase kemandirian antara 0 sampai 25 persen maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah *instruktif*, berarti peran pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. Bila hasil persentase kemandirian antara 25 sampai 50 persen maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah *konsultatif*, berarti peranan atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Bila hasil persentase kemandirian antara 50 sampai 75 persen maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah *partisipatif*, berarti

kemandirian daerah tersebut mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, karena peran pemerintah pusat semakin berkurang. Namun bila hasil prosentase kemandirian daerah antara 75 sampai 100 persen, maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah *delegatif* yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, dan pemerintah daerah dapat dikatakan sudah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Untuk menghitung kinerja pendapatan dan belanja APBD:

a. Varian indikator kinerja pendapatan:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Jika varian sama atau lebih dari 100% maka kinerja pendapatan disebut bagus dan sebaliknya.

b. Varian indikator kinerja belanja:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Jika varian kurang atau sama dengan 100% maka kinerja belanja disebut bagus dan sebaliknya.

3. Untuk mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja tingkat kemandirian dan pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta, Boedijoewono (2001: 231) menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan *trend*:

$$Y' = a + bX$$

dimana :

$Y'$  : nilai *trend*

$a$  : nilai konstanta yaitu nilai  $y$  pada saat nilai  $x = 0$

$b$  : nilai kemiringan yaitu tambahan nilai  $y$ , apabila  $x$  bertambah satu-satuan

$X$  : nilai periode tahun

Untuk memperoleh nilai  $a$  dan  $b$  dapat digunakan rumus berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{N} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

dimana :

$Y$  : nilai data yang akan dianalisis/ variabel varians

$N$  : jumlah data

- b. Menjelaskan hasil analisis *trend* berdasarkan cara diatas. Apabila garis *trend* naik berarti kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan dinilai semakin bagus. Apabila garis *trend* turun berarti kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami penurunan dan dinilai semakin buruk.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Pembentukan Pemerintah Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Bekas Hutan Bering, suatu kawasan diantara Sungai Winongo dan Sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Pemerintah Kota Yogyakarta baru dibentuk sejak tanggal 7 Juni 1947 dimana saat berdirinya disebut sebagai kota Praja. Berbeda dengan kota lainnya, di jaman penjajahan Belanda Kota Yogyakarta memang belum pernah menjadi Kota Otonom. Jadi Kota Yogyakarta belum pernah memiliki pemerintahan tersendiri. Kota Praja Yogyakarta yang lahir dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947 yang membentuk kota Yogyakarta sebagai Haminte Kota atau Kota Otonom. Undang-Undang tersebut merupakan produk perundang-undangan di jaman kemerdekaan tertanggal 7 Juni 1947. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu, bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan, bahkan lahir pada saat perjuangan nasional, ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam

pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanatnya yang pertama yang menyatakan, bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945 dan atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta beliau bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanatnya yang kedua yang menyatakan, bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat dibentuk satu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, akan tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan Otonom yang meliputi bidang Pemerintahan masih tetap di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi baru diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947 dimana pasal 1 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Secara Yuridis formal Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947 telah sah menjadi kota Otonom yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perangkat Pemerintahan sudah ada seperti: DPRD, Walikota yang wewenangnya telah jelas dan APBD pertamanya juga telah dilampirkan pada Undang-Undang pembentukan tersebut. Hanya penyerahan wewenang dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada kota Praja Yogyakarta yang menjadi haknya menurut Undang-Undang belum dilaksanakan.

Jika kita melihat keluarnya Undang-Undang Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947, maka kota Yogyakarta dibentuk sebagai Kota Praja sebelum clash I. Akan tetapi jika kita melihat penyerahan wewenang itu secara riil dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Praja Yogyakarta baru terjadi dalam tahun 1951, maka untuk melaksanakan penyerahan wewenang Otonomi tersebut disebabkan terjadinya clash I dan clash II setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947, selain itu juga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Membentuk Kota Yogyakarta sebagai kota Otonomi harus melalui Undang-Undang.
2. Dengan terbentuknya Kota Yogyakarta, maka akan merupakan bagian yang terpisah dari daerah Kasultanan dan Pakualaman serta memiliki otonomi sendiri.

Nampaknya dalam pembentukan Haminte Kota Yogyakarta kurang memperhatikan hal tersebut. Sebab pada tanggal 7 Juni 1947 status Daerah Istimewa Yogyakarta belum diatur dengan Undang-Undang oleh Pemerintah

Pusat sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945, padahal Kota Yogyakarta lebih dahulu dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Haminte kota dengan Undang-Undang. Ini akan berakibat bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan kehilangan kekuasaan dan pengawasannya terhadap pemerintah Haminte Kota Yogyakarta. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum bersedia menyerahkan sebagian wewenangnya, sebelumnya status Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan tetap mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya Pemerintahan Haminte Kota Yogyakarta.

Masalah itu bisa diatasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah dikeluarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 jo 19 tanggal 15 Agustus 1950 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan undang-undang nomor 16 tahun 1950 yang merubah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1947, dengan demikian Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Praja Yogyakarta sama-sama ditetapkan sebagai Daerah Otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dan Kota Praja Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat II sekaligus menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.



## B. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara  $110^{\circ} 24' 19''$  sampai  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur dan  $07^{\circ} 15' 24''$  sampai  $07^{\circ} 24' 26''$  Lintang Selatan. Jarak terjauh dari utara ke selatan  $\pm 7,5$  km dan dari barat ke timur kurang  $\pm 5,6$  km. Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0–2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 ha) berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Luas Kota Yogyakarta sekitar  $32,5 \text{ km}^2$  atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 610 Rw dan 2.512 Rt. Pembagian wilayah Kota Yogyakarta menurut kecamatan, kelurahan dan luas dapat dilihat pada tabel IV.1

**Tabel IV.1**  
**Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta**  
**Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Luas**

| No. | Kecamatan    | Kelurahan        | Jumlah |    | Luas (km <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------|------------------|--------|----|-------------------------|
|     |              |                  | Rw     | Rt |                         |
| 1.  | Tegalrejo    | Kricak           | 13     | 59 | 0,82                    |
|     |              | Karangwaru       | 14     | 56 | 0,70                    |
|     |              | Bener            | 7      | 24 | 0,57                    |
|     |              | Tegalrejo        | 12     | 46 | 0,82                    |
| 2.  | Jetis        | Bumijo           | 13     | 56 | 0,58                    |
|     |              | Cokrodiningratan | 11     | 60 | 0,66                    |
|     |              | Gowongan         | 13     | 52 | 0,46                    |
| 3.  | Gondokusuman | Demangan         | 12     | 44 | 0,74                    |
|     |              | Kotabaru         | 4      | 21 | 0,71                    |
|     |              | Klitren          | 16     | 63 | 0,68                    |
|     |              | Baciro           | 21     | 89 | 1,06                    |
| 4.  | Danurejan    | Terban           | 12     | 59 | 0,80                    |
|     |              | Suryatmajan      | 15     | 45 | 0,28                    |
|     |              | Tegalpanggung    | 16     | 66 | 0,35                    |
|     |              | Bausasran        | 12     | 49 | 0,47                    |
| 5.  | Gedongtengen | Sosromenduran    | 14     | 56 | 0,50                    |
|     |              | Pringgokusuman   | 23     | 90 | 0,46                    |
| 6.  | Ngampilan    | Ngampilan        | 13     | 70 | 0,45                    |
|     |              | Notoprajan       | 8      | 50 | 0,37                    |
| 7.  | Wirobrajan   | Pakuncen         | 12     | 56 | 0,65                    |
|     |              | Wirobrajan       | 12     | 58 | 0,65                    |
|     |              | Patangpuluhan    | 10     | 51 | 0,44                    |
| 8.  | Mantrijeron  | Gedongkiwo       | 18     | 86 | 0,90                    |
|     |              | Suryodiningratan | 17     | 69 | 0,85                    |
|     |              | Mantrijeron      | 20     | 76 | 0,86                    |
| 9.  | Kraton       | Patehan          | 10     | 43 | 0,40                    |
|     |              | Panembahan       | 18     | 78 | 0,66                    |
|     |              | Kadipaten        | 15     | 53 | 0,34                    |
| 10. | Gondomanan   | Ngupasan         | 13     | 49 | 0,45                    |
|     |              | Prawirodirjan    | 18     | 61 | 0,67                    |
| 11. | Pakualaman   | Purwokinanti     | 10     | 47 | 0,30                    |
|     |              | Gunungketur      | 9      | 36 | 0,33                    |
| 12. | Mergangsan   | Keparakan        | 13     | 58 | 0,53                    |
|     |              | Wirogunan        | 24     | 76 | 0,85                    |
|     |              | Brotokusuman     | 23     | 83 | 0,93                    |
| 13. | Umbulharjo   | Semaki           | 10     | 34 | 0,66                    |
|     |              | Muja-muju        | 12     | 54 | 1,53                    |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

**Tabel IV. 1**  
**Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta**  
**Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Luas (Lanjutan)**

| No. | Kecamatan     | Kelurahan    | Jumlah     |              | Luas (km <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
|     |               |              | Rw         | Rt           |                         |
|     |               | Tahunan      | 11         | 48           | 0,78                    |
|     |               | Warungboto   | 9          | 38           | 0,83                    |
|     |               | Pandeyan     | 11         | 45           | 1,38                    |
|     |               | Sorosutan    | 15         | 59           | 1,68                    |
|     |               | Giwangan     | 13         | 41           | 1,26                    |
| 14. | Kotagede      | Rejowinangun | 13         | 45           | 1,25                    |
|     |               | Prenggan     | 11         | 55           | 0,99                    |
|     |               | Purbayan     | 14         | 58           | 0,83                    |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>45</b>    | <b>610</b> | <b>2.512</b> | <b>32,50</b>            |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

### C. Penduduk dan Tenaga Kerja

#### 1. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2004 sebanyak 513.893 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Laki-laki : 263.650 orang
- b. Perempuan : 250.243 orang

Secara terperinci distribusi penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Kecamatan, seperti tertera pada tabel IV.2. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2004 mencapai 15.812 orang per kilometer per segi.

**Tabel IV.2**  
**Distribusi Frekuensi Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Kecamatan**

| No.           | Kecamatan    | Jumlah (Jiwa)  |
|---------------|--------------|----------------|
| 1.            | Mantrijeron  | 40.570         |
| 2.            | Kraton       | 29.632         |
| 3.            | Mergangsan   | 42.029         |
| 4.            | Umbulharjo   | 72.021         |
| 5.            | Kotagede     | 31.474         |
| 6.            | Gondokusuman | 74.887         |
| 7.            | Danurejan    | 31.268         |
| 8.            | Pakualaman   | 14.902         |
| 9.            | Gondomanan   | 17.628         |
| 10.           | Ngampilan    | 23.487         |
| 11.           | Wirobrajan   | 30.859         |
| 12.           | Gedongtengen | 26.601         |
| 13.           | Jetis        | 37.626         |
| 14.           | Tegalrejo    | 40.909         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>513.893</b> |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

## 2. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 9.475 orang, yang terdiri dari 88,38 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,62 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,08 persen, golongan II 22,15 persen, golongan III 54,46 persen dan sisanya golongan IV 21,31 persen.

Jumlah Pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 sebanyak 18.964 orang yang terdiri dari 10.907 laki-laki dan 8.057 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 61,34 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (26,72 persen), Diploma (9,86 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMTP dan SD.

#### D. Hasil Utama Daerah

Apabila dicermati dari kontribusi 9 (sembilan) lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa jenis lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 25,28% terhadap PDRB Kota Yogyakarta, kemudian diikuti dengan jasa-jasa sebesar 24,03%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 16%. Komposisi tersebut terkait erat dengan kedudukan Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemukakan di Indonesia dan sekaligus sebagai kota pendidikan, sehingga dapat dipahami apabila di Kota Yogyakarta berkembang industri kerajinan sebagai pendukung kegiatan kepariwisataan dan pendidikan.

Berdasarkan data terakhir, diperoleh bahwa produk dari industri kerajinan tersebut telah pula diekspor ke berbagai negara. Adapun 10 besar jenis hasil produk industri kerajinan yang dieksport tersebut dapat dilihat pada tabel IV.3.

**Tabel IV.3**  
**Hasil Utama Daerah**

| No. | Jenis Hasil Industri Kerajinan | Volume (Kg)   |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 1.  | Mebel kayu                     | 11.198.459,48 |
| 2.  | Kerajinan kayu                 | 1.066.636,23  |
| 3.  | Kerajinan batu                 | 1.100.424,93  |
| 4.  | Kerajinan tanah liat           | 857.230,17    |
| 5.  | Kerajinan keramik              | 222.190,10    |
| 6.  | Kulit lembaran                 | 203.624,80    |
| 7.  | Kerajinan bamboo               | 179.542,85    |
| 8.  | Kerajinan rotan                | 126.641,77    |
| 9.  | Kerajinan besi                 | 70.824,40     |
| 10. | Kerajinan perak                | 2.208,84      |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

## **E. Sosial**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai.

Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2004/2005 di Kota Yogyakarta terdapat 50 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 Universitas, 10 Institut atau Sekolah Tinggi dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 4.980 orang yang terdiri dari 4.636 orang dosen yayasan dan 344 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 76.071 orang.

### **2. Agama**

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2004 sebanyak 329.386 orang atau 82,76 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,18 persen Katolik; 6,31 persen Kristen; 0,22 persen Hindu; 0,43 persen Budha.

### 3. Sosial Lainnya

Jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti pada tahun 2004 sebanyak 618 anak yang terdiri dari 382 anak laki-laki dan 236 anak perempuan. Jumlah penderita cacat tercatat 2.502 orang. Pada tahun 2003 orang terlantar berjumlah 327 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 392 orang.

### **F. Organisasi Pemerintahan Daerah**

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Yogyakarta dibentuk perangkat daerah Kota Yogyakarta. Pembentukan perangkat Daerah Kota Yogyakarta di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan yang dimiliki dan kondisi serta potensi Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk perangkat daerah, sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  - a Sekretaris Daerah
  - b Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, membidangi Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pengendalian Pembangunan
  - c Asisten Hukum dan Organisasi, membidangi Bagian Hukum dan Bagian Organisasi

- d Asisten Administrasi, membidangi Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan
2. Sekretariat DPRD
  3. Dinas Daerah, terdiri daerah:
    - a Dinas Pertanian dan Kehewananan
    - b Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
    - c Dinas Kesehatan
    - d Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
    - e Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - f Dinas Pengelolaan Pasar
    - g Dinas Ketertiban
    - h Dinas Perekonomian
    - i Dinas Pendidikan dan Pengajaran
    - j Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman
    - k Dinas Prasarana Kota
    - l Dinas Perhubungan
    - m Dinas Tata Kota dan Bangunan
  4. Lembaga Pengawasan Internal
  5. Badan, terdiri dari:
    - a Badan Kepegawaian Daerah
    - b Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
    - c Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    - d Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil



6. Kantor, terdiri dari:
  - a Kantor Pelayanan Pajak Daerah
  - b Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - c Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga
  - d Kantor Arsip dan Pengelolaan Data Elektronik
  - e Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
  - f Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi
  - g Kantor Penanggulangan Kebakaran
7. RSUD
8. BUMD, terdiri dari:
  - a PDAM Tirtamarta
  - b PD BPR Bank Pasar
9. Kecamatan, terdiri dari 14 kecamatan
10. Kelurahan, terdiri dari 45 kelurahan

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, kinerja pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004, serta mengetahui perkembangan *trend* kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari tingkat kemandirian dan kinerja pendapatan pada tahun 2001–2004. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perhitungan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 (lihat lampiran).

#### **A. Analisis Data**

##### **1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta**

Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Perhitungan APBD dapat melihat bagaimana kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta. Tingkat kemandirian dilihat dengan menggunakan rasio kemandirian yang menggambarkan ketergantungan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap sumber dana ekstern. Tabel V.1 menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta antara tahun 2001 sampai 2004.

**Tabel V. 1**  
**Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2001 – 2004**

| <b>Tahun</b> | <b>PAD (Rp)</b>   | <b>Bantuan &amp; Pinjaman (Rp)</b> | $\frac{PAD}{Bantuan \& Pinjaman} \times 100\%$ | <b>Kemampuan Keuangan</b> | <b>Pola Hubungan</b> |
|--------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 2001         | 40.352.592.890,43 | 134.151.472.334,00                 | 30,08  | Rendah                    | Konsultatif          |
| 2002         | 56.377.459.398,89 | 162.874.512.500,00                 | 34,61  | Rendah                    | Konsultatif          |
| 2003         | 68.621.564.311,07 | 237.708.466.015,07                 | 28,88  | Rendah                    | Konsultatif          |
| 2004         | 79.911.419.100,82 | 238.550.019.319,69                 | 33,50  | Rendah                    | Konsultatif          |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (data diolah)

Kinerja pendapatan dapat diukur dengan varian indikator kinerja pendapatan yaitu membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%. Kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan Tabel V.2.

**Tabel V.2**  
**Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2001–2004**

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Target PAD (Rp)   | $\frac{RealisasiPAD}{TargetPAD} \times 100\%$ |
|-------|--------------------|-------------------|---|
| 2001  | 40.352.592.890,43  | 33.125.458.598,74 | 121,82%                                       |
| 2002  | 56.377.459.398,89  | 49.685.313.410,17 | 113,47%                                       |
| 2003  | 68.621.564.311,07  | 56.822.010.000,00 | 120,76%                                       |
| 2004  | 79.911.419.100,82  | 70.412.081.000,00 | 113,49%                                       |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (data diolah)

Pada tahun 2003 dan 2004 terjadi perubahan dalam penyusunan APBD. APBD tahun 2001-2002 masih menggunakan APBD tradisional yaitu hanya terdiri dari pos Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Hal ini sesuai dengan pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut maka perubahan APBD baru terlaksana pada tahun 2003. Perubahan dalam penyusunan APBD tersebut mengakibatkan perbedaan dalam menghitung varian indikator

kinerja belanja. Pada tahun 2001 dan 2002 varian indikator kinerja belanja dihitung dengan menggunakan rumus:

1. Varian indikator kinerja Belanja Rutin

$$\frac{\text{RealisasiBelanjaRutin}}{\text{AnggaranBelanjaRutin}} \times 100\%$$

2. Varian indikator kinerja Belanja Pembangunan

$$\frac{\text{RealisasiBelanjaPembangunan}}{\text{AnggaranBelanjaPembangunan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung varian indikator kinerja belanja pada tahun tahun 2003 dan 2004 menggunakan rumus:

1. Varian indikator kinerja belanja aparatur daerah

$$\frac{\text{RealisasiBelanjaAparaturDaerah}}{\text{AnggaranBelanjaAparaturDaerah}} \times 100\%$$

2. Varian indikator kinerja belanja pelayanan publik

$$\frac{\text{RealisasiBelanjaPelayananPublik}}{\text{AnggaranBelanjaPelayananPublik}} \times 100\%$$

Perhitungan varian indikator kinerja Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan pada tahun 2001 dan 2002 dapat dilihat pada Tabel V.3 sedangkan perhitungan varian indikator kinerja Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik pada tahun 2003 dan 2004 dapat dilihat pada tabel V.4.

**Tabel V.3****Perhitungan varian indikator kinerja Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan pada tahun 2001 dan 2002**

| Indikator Kinerja Belanja | Realisasi (Rp)     |                    | Anggaran (Rp)      |                    | %     |       | Evaluasi |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|----------|
|                           | 2001               | 2002               | 2001               | 2002               | 2001  | 2002  |          |
| Rutin                     | 175.960.709.677,39 | 190.827.224.760,01 | 186.336.774.000,00 | 249.283.379.386,00 | 94,43 | 76,55 | Bagus    |
| Pembangunan               | 16.453.251.437,00  | 33.998.267.081,00  | 19.130.241.000,00  | 37.790.158.614,00  | 86,01 | 89,96 | Bagus    |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (data diolah)

**Tabel V.4****Perhitungan varian indikator kinerja Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik pada tahun 2003 dan 2004**

| Indikator Kinerja Belanja | Realisasi (Rp)     |                    | Anggaran (Rp)      |                    | %     |       | Evaluasi |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|----------|
|                           | 2003               | 2004               | 2003               | 2004               | 2003  | 2004  |          |
| Aparatur Daerah           | 52.950.512.131,94  | 58.351.605.850,29  | 62.807.668.122,00  | 65.747.492.220,00  | 84,31 | 88,75 | Bagus    |
| Pelayanan Publik          | 252.400.520.295,50 | 311.988.969.919,75 | 284.849.295.261,00 | 349.459.699.097,00 | 88,61 | 89,29 | Bagus    |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (data diolah)

## 2. Analisis Trend

### a. Trend tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta

Trend tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 ditunjukkan dalam Tabel V.5.

**Tabel V.5**  
**Trend Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004**

| Tahun  | Tingkat Kemandirian (%) (Y) | X  | X.Y    | X <sup>2</sup> | Y'    |
|--------|-----------------------------|----|--------|----------------|-------|
| 2001   | 30,08                       | -3 | -90,18 | 9              | 31,07 |
| 2002   | 34,61                       | -1 | -34,61 | 1              | 31,53 |
| 2003   | 28,88                       | 1  | 28,88  | 1              | 31,99 |
| 2004   | 33,50                       | 3  | 100,50 | 9              | 32,45 |
| Jumlah | 127,07                      |    | 4,59   | 20             |       |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (data diolah)

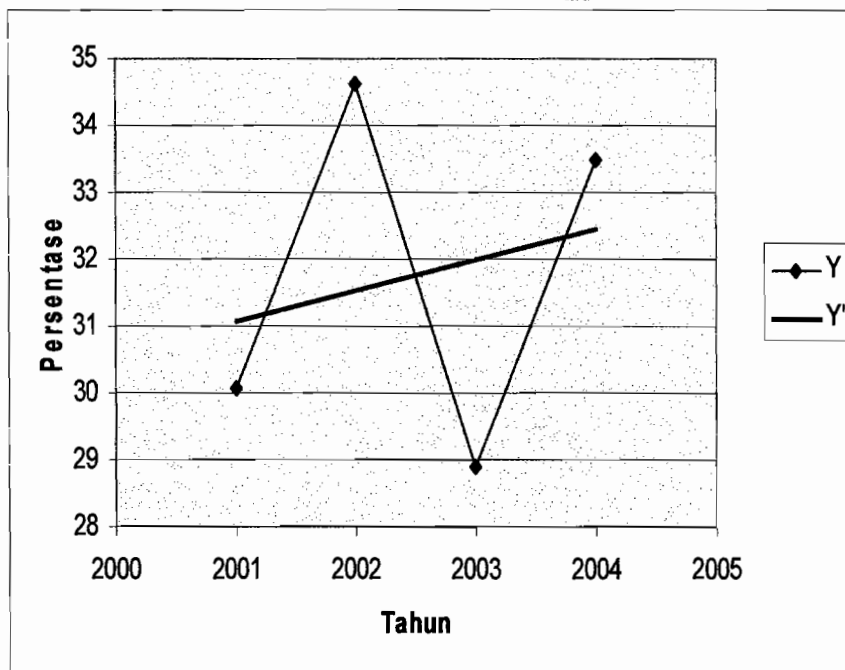
Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{127,07}{4} = 31,76 \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{4,59}{20} = 0,23$$

Jadi garis persamaan *trend* untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta adalah:

$$Y' = 31,76 + 0,23X$$

Tabel *trend* tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta diatas dapat dilihat pada Grafik V.1.



**Grafik V.1**  
**Trend Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004**

b. *Trend Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta*

*Trend kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun*

2001–2004 ditunjukkan dalam Tabel V.6.

**Tabel V.6**  
**Trend Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001–2004**

| Tahun  | Kinerja Pendapatan (Y) | X  | X.Y     | X <sup>2</sup> | Y'     |
|--------|------------------------|----|---------|----------------|--------|
| 2001   | 121,82                 | -3 | -365,46 | 9              | 120,03 |
| 2002   | 113,47                 | -1 | -113,47 | 1              | 118,27 |
| 2003   | 120,76                 | 1  | 120,76  | 1              | 116,51 |
| 2004   | 113,49                 | 3  | 340,47  | 9              | 114,75 |
| Jumlah | 469,54                 |    | -17,70  | 20             |        |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta (data diolah)



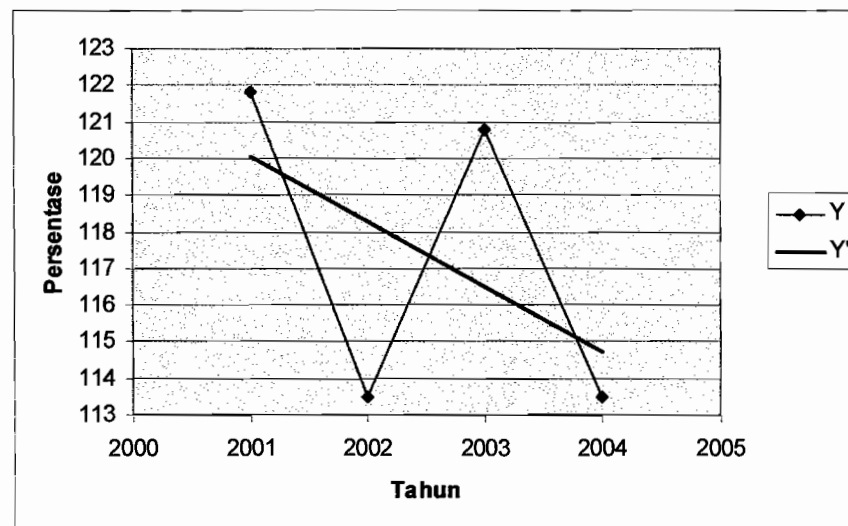
Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{469,54}{4} = 117,39 \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-17,70}{5} = -0,88$$

Jadi garis persamaan *trend* untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta adalah:

$$Y' = 117,39 - 0,88X$$

Tabel *trend* kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta diatas dapat dilihat pada Grafik V.2.



**Grafik V.2**  
**Trend Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001–2004**

## B. Pembahasan

Tabel V.1 menunjukkan bagaimana kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 berada diantara 28,88%–34,61%. Dengan tingkat kemandirian terendah berada pada tahun 2003 yaitu

28,88% dan tingkat kemandirian tertinggi berada pada tahun 2002 yaitu 34,61%. Pada tahun 2001 tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 30,08%. Tingkat kemandirian tahun 2002 naik sebesar 4,67% menjadi 34,61%. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya pendapatan yang berasal dari daerah seperti Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. Tahun 2003 tingkat kemandirian turun sebesar 5,73%. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya Bantuan dan Pinjaman Pemerintah Kota Yogyakarta dari Pemerintah Pusat atau Propinsi. Tahun 2004 tingkat kemandirian naik sebesar 4,62%. Kenaikan tingkat kemandirian ini disebabkan karena bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dan berkurangnya Bantuan dan Pinjaman Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan persentase tersebut kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk rendah. Menurut Halim (2004:189) persentase kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta berada antara 25%-50%. Persentase tersebut menunjukkan pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau propinsi bersifat *konsultatif* yang berarti peranan atau campur tangan pemerintah pusat atau propinsi sudah mulai berkurang.

Tabel V.2 menunjukkan kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 yaitu antara 113,47%-121,82%. Persentase kinerja pendapatan tertinggi ada pada tahun 2003 yaitu 121,82% dan persentase terendah tahun 2002 yaitu 113,47%. Tahun 2001 kinerja pendapatan sebesar 121,82%. Tahun 2002 kinerja pendapatan turun sebesar 8,35% menjadi sebesar 113,47%. Tahun 2003 kinerja pendapatan naik sebesar

7,29% menjadi 120,76%. Tahun 2004 kinerja pendapatan turun sebesar 7,27% menjadi 113,49%. Kenaikan atau Penurunan persentase tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berada diatas 100% sehingga dinilai bagus.

Tabel V.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2001 realisasi Belanja Rutin Pemerintah Kota Yogyakarta dibawah 100% yaitu 94,43% angka ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Rutin Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2001 bagus. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2002 kinerja Belanja Rutin Pemerintah Kota Yogyakarta dikatakan bagus karena hanya terealisasi sebesar 76,55%. Kinerja Belanja Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001 dinilai bagus karena terealisasi dibawah 100% yaitu sebesar 86,01% demikian juga pada tahun 2002 Kinerja Belanja Pembangunan dinilai bagus karena teralisasi dibawah 100% yaitu 89,96%.

Tabel V.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 realisasi Belanja Aparatur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dibawah 100% yaitu 84,31% angka ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Aparatur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2003 bagus. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2004 kinerja Belanja Aparatur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dikatakan bagus karena hanya terealisasi sebesar 88,75%. Kinerja Belanja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2003 dinilai bagus karena terealisasi dibawah 100% yaitu sebesar 88,61% demikian juga pada tahun 2004 Kinerja Belanja Pelayanan Publik dinilai bagus karena teralisasi dibawah 100% yaitu sebesar 89,29%.

Tabel V.5 menunjukkan trend tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004 berada antara 31,07% sampai 32,45% dengan tingkat kemandirian terendah tahun 2001 yaitu 31,07% dan tingkat kemandirian tertinggi tahun 2004 yaitu 32,45%. Angka kemandirian tersebut dapat menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta hanya berada antara 25%-50% sehingga pola hubungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Propinsi atau Pusat masih bersifat *konsultatif* yang artinya peranan atau campur tangan pemerintah propinsi atau pusat sudah mulai berkurang.

Grafik V.1 menunjukkan garis trend kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2001–2004 cenderung naik yaitu berada antara 31,07% sampai 32,4%. Kenaikkan garis trend ini menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta semakin baik. Grafik V.1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin mandiri.

Tabel V.6 menunjukkan perkembangan varian indikator kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta berada antara 114,75% sampai 120,03%. Pada tahun 2001 kinerja pendapatan paling tinggi yaitu pada persentase 120,03% dan pendapatan paling rendah pada tahun 2004 yaitu 114,75%.

Grafik V.2 menunjukkan garis trend kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001–2004 cenderung menurun. Penurunan garis trend dapat dilihat pada garis 120,03% sampai 114,75%. Penurunan garis

trend kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001-2004 menunjukkan kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bagus.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan bab 5 yang membahas tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta bersifat *konsultatif* yang berarti bahwa peran pemerintah pusat atau propinsi sudah mulai berkurang.
2. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 bagus karena varian indikator kinerja pendapatan di atas 100%. Kinerja Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001–2004 bagus karena varian indikator kinerja belanja di bawah 100%.
3. Garis *trend* pertumbuhan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta cenderung naik. Kenaikkan ini berarti kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin baik atau semakin mandiri. Garis *trend* kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta cenderung menurun. Penurunan ini berarti kinerja pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun-tahun selanjutnya tidak baik.

## B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang tidak mampu penulis hindari yaitu perubahan kebijakan undang-undang yang mengatur penyusunan APBD, sehingga penulis tidak dapat membuat *trend* perkembangan kinerja belanja Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2004.

## C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2004, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya mempertahankan kinerja keuangan yang dalam kondisi bagus serta berusaha meningkatkannya agar pertumbuhan kinerja keuangan tidak turun.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode penelitian dimana kebijakan undang-undang yang berlaku sama.
3. Mengukur kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta secara *finansial* saja tidak cukup karena masih ada faktor *non-finansial* yang harus diperhatikan. Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan analisis *value for money*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2004. *Kota Yogyakarta dalam Angka*. BPS: Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE: Yogyakarta
- , 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta
- Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Jilid 1. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta
- , 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara: Jakarta
- Madiasmu. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi: Yogyakarta
- , 2002. Assessing Accountability of Performance Measurement System and Local Government Budgetary Management. *Gadjah Mada International Journal of Business*. Vol 4 No 3. hal 373 – 395
- , 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta
- MEP-UGM. 2003. *Bahan Kuliah Seminar Keuangan Daerah*. Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*



Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

Randa, Fransiskus. 2002. Analisis Kinerja Keuangan Anggota Koperasi Kredit BK3D Sulawesi Selatan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*, Januari. Vol 1 No 2. hal 11 – 17

Suharyadi, dan Purwanto S.K. 2003. *Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan*. Salemba Empat: Jakarta

Yulia, Neil. 2003. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Propinsi Riau 1997/1998 – 2001. *Tesis S-2*. Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. Tidak dipublikasikan

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

NOMOR : 070/707  
1537/34

Dasar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/1899

Tanggal : 11/04/2006

Mengingat

1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 381.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada

Nama : MITA YUWANTI NO MHS / NIM : 022114049  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi USD  
Alamat : Jl. Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Ir. Drs. Hansladi Yuli Hartanto, Akt., M.Si.  
Keperluan : Melakukan Observasi Penelitian dengan judul Proposal : EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2001-2004

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 11/04/2006 Sampai 11/07/2006

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

MITA YUWANTI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BPKD Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22/04/2006





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209 - 217), 582811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. : (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0 / 1899

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk No :31/Kaprodi Akt/080/IV/2006  
Tanggal : 3 April 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : MITA YUWANTI No. MHSW : 022114049  
Alamat Instansi : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta  
Judul : EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2001-2004

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 11 April 2006 s/d 11 Juli 2006

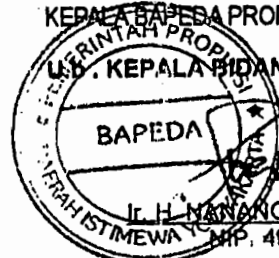
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perijinan;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk;
5. Peninggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 11 April 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
U.S. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



IL. H. NAWANG SUWANDI, MMA  
NIP. 490 022 448

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2001**

| NO. | PENDAPATAN   | JUMLAH             |                    | NO. | BELANJA   | JUMLAH             |                    |
|-----|--|--------------------|--------------------|-----|---|--------------------|--------------------|
|     |  | ANGGARAN<br>(Rp)   | REALISASI<br>(Rp)  |     |   | ANGGARAN<br>(Rp)   | REALISASI<br>(Rp)  |
| I   | <b>PENDAPATAN</b>                                      |                    |                    | II  | <b>BELANJA</b>  |                    |                    |
|     |  |                    |                    | A.  | <b>RUTIN</b>  | 186.336.774.000,00 | 175.960.709.677,39 |
| 1   | Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu | 19.183.584.331,26  | 9.183.584.331,26   | 1   | Belanja Pegawai   | 140.821.096.109,00 | 142.335.453.916,00 |
|     |  |                    |                    | 2   | Belanja Barang  | 23.260.338.407,00  | 21.595.467.694,00  |
|     |  |                    |                    | 3   | Belanja Pemeliharaan  | 5.861.979.439,00   | 5.641.966.729,00   |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                          | 33.125.458.598,74  | 40.352.592.890,43  | 4   | Belanja Perjalanan Dinas  | 2.865.320.373,00   | 2.672.404.600,00   |
| a   | Pendapatan Pajak Daerah                                | 17.814.447.519,50  | 22.886.374.632,50  | 5   | Angsuran Hutang dan Bunga   | 2.374.053.178,00   | 2.312.394.074,49   |
| b   | Pendapatan Retribusi Daerah                            | 11.503.842.084,00  | 1.773.895.343,16   | 6   | Pensiun dan Onderstand  | -                  | -                  |
| c   | Bagian Laba Usaha Daerah                               | 2.249.570.045,51   | 2.249.570.025,31   | 7   | Bantuan Keuangan (Ganjaran)   | 662.900.510,00     | 662.900.510,00     |
| d   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                       | 1.557.598.952,73   | 3.442.752.889,46   | 8   | Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Laba Lain                            | 816.587.600,00     | 632.461.153,00     |
| 3   | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                | 153.014.249.000,00 | 167.269.506.353,29 | 9   | Pengeluaran Tidak Tersangka   | 9.574.498.484,00   | 107.661.000,00     |
| a   | Bagi Hasil Pajak                                       | 17.872.784.000,00  | 32.634.378.613,29  |     |   |                    |                    |
| b   | Bagi Hasil Bukan Pajak                                 | 1.220.000.000,00   | 482.655.406,00     | B   | <b>PEMBANGUNAN</b>  | 19.130.241.000,00  | 16.453.251.437,00  |
| c   | Dana Alokasi Umum                                      | 113.438.727.000,00 | 113.437.221.225,00 | 1   | Sektor Industri   | 58.878.000,00      | 57.991.500,00      |
| d   | Dana Alokasi Khusus                                    | 20.482.738.000,00  | 20.714.251.109,00  | 2   | Sektor Pertanian dan Kehutanan  | 421.650.000,00     | 399.252.350,00     |
| e   | Dana Darurat   | 0,00               | 0,00               | 3   | Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi  | 0,00               | 0,00               |
| 4   | <b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>               | 0,00               | 0,00               | 4   | Sektor Tenaga Kerja   | 109.300.000,00     | 103.057.750,00     |
| a   | Pos Pinjaman Dalam Negeri                              | 0,00               | 0,00               | 5   | Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi | 2.463.234.495,00   | 2.429.030.615,00   |
| b   | Pos Pinjaman Luar Negeri                               | 0,00               | 0,00               | 6   | Sektor Transportasi   | 2.838.389.422,00   | 2.589.981.750,00   |
| 5   | <b>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>            | 143.723.070,00     | 203.486.495,00     | 7   | Sektor Pertambangan dan Energi  | 0,00               | 0,00               |
|     |  |                    |                    | 8   | Sektor Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi                                   | 198.656.000,00     | 167.843.300,00     |
|     |  |                    |                    | 9   | Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman                                     | 1.836.050.000,00   | 1.707.468.930,00   |

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2001**  
**(LANJUTAN)**

|  |                            |                    |                    |  |                    |                     |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|
|  |                            |                    | 10                 | Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang   | 368.500.000,00     | 350.257.7           |
|  |                            |                    | 11                 | Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah raga | 1.852.133.638,00   | 1.769.259.9         |
|  |                            |                    | 12                 | Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera   | 242.700.000,00     | 242.700.0           |
|  |                            |                    | 13                 | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja                                | 1.569.792.500,00   | 1.371.672.7         |
|  |                            |                    | 14                 | Sektor Perumahan dan Pemukiman   | 2.004.670.901,00   | 703.792.0           |
|  |                            |                    | 15                 | Sektor Agama   | 157.200.000,00     | 157.200.0           |
|  |                            |                    | 16                 | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  | 161.500.000,00     | 156.960.3           |
|  |                            |                    | 17                 | Sektor Hukum   | 231.015.000,00     | 213.282.7           |
|  |                            |                    | 18                 | Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan  | 4.391.367.794,00   | 3.819.667.3         |
|  |                            |                    | 19                 | Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa   | 22.006.000,00      | 22.006.0            |
|  |                            |                    | 20                 | Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum  | 203.197.250,00     | 191.826.2           |
|  |                            |                    | 21                 | Sektor Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawah   | 0,00               |                     |
|  | Jumlah Pendapatan          | 205.467.015.000,00 | 227.009.170.069,98 | Jumlah Belanja   | 205.467.015.000,00 | 192.413.961.1       |
|  | Urusan Kas dan Perhitungan | 18.284.173.920,00  | 15.758.971.859,00  | Urusan Kas dan Perhitungan   | 18.284.173.920,00  | 15.758.971.8        |
|  |                            |                    |                    | <b>Sisa Perhitungan Tahun 2001</b>   |                    | <b>35.596.366.5</b> |
|  | Jumlah                     | 223.751.188.920,00 | 243.769.299.493,98 | Jumlah   | 223.751.188.920,00 | 243.769.299.4       |

Sumber. BPKD Kota Yogyakarta

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2002**

| NO. | PENDAPATAN   | JUMLAH                    |                           | NO. | BELANJA  | JUMLAH                    |                           |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|-----|--|---------------------------|---------------------------|
|     |  | ANGGARAN<br>(Rp)          | REALISASI<br>(Rp)         |     |  | ANGGARAN<br>(Rp)          | REALISASI<br>(Rp)         |
|     | <b>PENDAPATAN</b>  |                           |                           | 1   | <b>RUTIN</b>   | <b>249.283.379.386,00</b> | <b>190.827.224.760,01</b> |
|     |  |                           |                           | a   | Belanja Pegawai  | 167.594.997.525,00        | 135.393.683.816,00        |
|     |  |                           |                           | b   | Belanja Barang   | 30.236.812.172,00         | 27.899.625.010,00         |
| 1   | Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu                             | 34.595.208.955,59         | 35.596.366.520,59         | c   | Belanja Operasi dan Pemeliharaan                                     | 8.431.708.772,00          | 8.147.911.969,00          |
|     |  |                           |                           | d   | Belanja Perjalanan Dinas   | 2.389.148.210,00          | 2.110.625.725,00          |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>  | <b>49.685.313.410,17</b>  | <b>56.377.459.398,89</b>  | e   | Belanja Lain-lain  | 14.055.456.539,00         | 12.977.997.388,25         |
| a   | Pendapatan Pajak Daerah  | 27.107.396.233,00         | 30.517.591.845,50         | f   | Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga                                   | 2.228.011.389,00          | 2.223.800.069,76          |
| b   | Pendapatan Retribusi Daerah  | 13.991.791.110,00         | 14.193.457.159,11         | g   | Bagian Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan                               | 0,00                      | 0,00                      |
| c   | Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.509.234.852,65          | 2.509.234.852,65          | h   | Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain                          | 1.652.065.503,00          | 1.577.798.332,00          |
| d   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  | 5.076.891.214,52          | 9.157.175.541,63          | i   | Pengeluaran tidak Tersangka  | 22.695.179.276,00         | 495.782.450,00            |
| 3   | <b>DANA PERIMBANGAN</b>  | <b>185.333.797.889,24</b> | <b>187.933.763.862,24</b> | 2   | <b>PEMBANGUNAN</b>   | <b>37.790.158.614,00</b>  | <b>33.998.267.081,00</b>  |
| a   | Bagi Hasil Pajak   | 21.985.125.317,00         | 24.744.094.790,00         | a   | Sektor Industri  | 80.000.000,00             | 75.054.750,00             |
| b   | Bagi Hasil Bukan Pajak   | 808.672.572,24            | 350.156.572,24            | b   | Sektor Pertanian dan Kehutanan                                       | 525.534.050,00            | 516.333.100,00            |
| c   | Dana Alokasi Umum  | 162.540.000.000,00        | 162.874.512.500,00        | c   | Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| d   | Dana Alokasi Khusus  | 0,00                      | 0,00                      | d   | Sektor Tenaga Kerja  | 139.291.000,00            | 135.038.130,00            |
| e   | Dana Darurat   | 0,00                      | 0,00                      | e   | Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi | 3.355.993.400,00          | 3.332.591.050,00          |
| 4   | <b>PINJAMAN DAERAH</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | f   | Sektor Transportasi  | 2.795.937.150,00          | 2.600.701.210,00          |
| a   | Pinjaman Dalam Negeri  | 0,00                      | 0,00                      | g   | Sektor Pertambangan dan Energi                                       | 0,00                      | 0,00                      |
| b   | Pinjaman Luar Negeri   | 0,00                      | 0,00                      | h   | Sektor Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Daerah                     | 159.747.500,00            | 154.936.400,00            |
| 5   | <b>LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>   | <b>17.459.217.745,00</b>  | <b>23.077.480.755,96</b>  | i   | Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman                              | 8.003.885.550,00          | 6.671.820.315,00          |
|     |  |                           |                           | j   | Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang                               | 360.079.350,00            | 338.902.900,00            |

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2002**  
**(LANJUTAN)**

|  |                                   |                           |                           |   |  |                           |                           |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|
|  |                                   |                           |                           | k | Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah raga | 4.443.031.150,00          | 4.371.845.375,00          |
|  |                                   |                           |                           | m | Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera   | 61.500.000,00             | 61.147.500,00             |
|  |                                   |                           |                           | n | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita, Anak dan Remaja                                 | 2.022.089.950,00          | 1.924.172.223,00          |
|  |                                   |                           |                           | p | Sektor Perumahan dan Pemukiman   | 5.945.756.665,00          | 4.948.301.183,00          |
|  |                                   |                           |                           | q | Sektor Agama   | 149.000.000,00            | 148.200.000,00            |
|  |                                   |                           |                           | r | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  | 628.500.000,00            | 558.949.860,00            |
|  |                                   |                           |                           | s | Sektor Hukum   | 196.000.000,00            | 190.076.800,00            |
|  |                                   |                           |                           | t | Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan  | 8.250.826.349,00          | 7.322.535.810,00          |
|  |                                   |                           |                           | u | Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa   | 176.704.000,00            | 169.804.725,00            |
|  |                                   |                           |                           | v | Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum  | 495.282.500,00            | 477.855.750,00            |
|  |                                   |                           |                           | w | Sektor Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan   | 0,00                      | 0,00                      |
|  |                                   |                           |                           |   | <b>Sisa Perhitungan TA. 2002:</b>  |                           | <b>78.194.578.696,67</b>  |
|  | <b>JUMLAH</b>                     | <b>287.073.538.000,00</b> | <b>303.020.070.537,68</b> |   | <b>JUMLAH</b>  | <b>287.073.538.000,00</b> | <b>303.020.070.537,68</b> |
|  | <b>URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN</b> | <b>948.868.385,00</b>     | <b>16.285.691.850,00</b>  |   | <b>URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN</b>  | <b>948.868.385,00</b>     | <b>16.285.691.850,00</b>  |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003**

| NO. | URAIAN  | APBD 2003                 |                           |               |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
|     |   | ANGGARAN<br>(Rp)          | REALISASI<br>(Rp)         | %             |
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>   |                           |                           |               |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                   |                           |                           |               |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah   | 32.068.358.000,00         | 33.526.514.267,53         | 104,55        |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                     | 15.718.585.000,00         | 16.093.220.898,50         | 102,38        |
| 5   | Pendapatan Hsl Prsh Milik Drh & Hsl Pengel Kekay Drh Yg Dipisah | 2.509.235.000,00          | 4.081.649.388,86          | 162,67        |
| 6   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                                | 6.525.832.000,00          | 14.920.179.756,18         | 228,63        |
| 7   | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                            | <b>56.822.010.000,00</b>  | <b>68.621.564.311,07</b>  | <b>120,77</b> |
| 8   | <b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>                              |                           |                           |               |
| 9   | Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak             | 25.458.673.000,00         | 32.300.731.328,00         | 126,88        |
| 10  | Dana Alokasi Umum   | 196.100.000.000,00        | 196.100.000.000,00        | 100,00        |
| 11  | Dana Alokasi Khusus   | 4.200.000.000,00          | 4.200.000.000,00          | 100,00        |
| 12  | Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi             | 12.997.640.000,00         | 20.912.000.015,07         | 160,89        |
| 13  | <b>Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan</b>                       | <b>238.756.313.000,00</b> | <b>253.512.731.343,07</b> | <b>106,18</b> |
| 14  | <b>PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH</b>                            | <b>7.841.710.000,00</b>   | <b>16.496.466.000,00</b>  | <b>210,37</b> |
| 15  | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>303.420.033.000,00</b> | <b>338.630.761.654,14</b> | <b>111,60</b> |
| 16  | <b>BELANJA</b>  |                           |                           |               |
| 17  | <b>Belanja Aparatur Daerah</b>                                  |                           |                           |               |
| 18  | Belanja Administrasi Umum                                       | 26.581.823.882,00         | 19.447.043.068,94         | 73,16         |
| 19  | Belanja Operasi dan Pemeliharaan                                | 18.366.162.540,00         | 16.480.358.307,00         | 89,73         |
| 20  | Belanja Modal / Pembangunan                                     | 17.859.681.700,00         | 17.023.110.756,00         | 95,32         |
| 21  | <b>Jumlah Belanja Aparatur Daerah</b>                           | <b>62.807.668.122,00</b>  | <b>52.950.512.131,94</b>  | <b>84,31</b>  |
| 22  | <b>Belanja Pelayanan Publik</b>                                 |                           |                           |               |
| 23  | Belanja Administrasi Umum                                       | 186.898.710.462,00        | 166.942.266.025,00        | 89,32         |
| 24  | Belanja Operasi dan Pemeliharaan                                | 28.550.000.880,00         | 26.813.257.737,00         | 93,92         |
| 25  | Belanja Modal / Pembangunan                                     | 46.128.974.703,00         | 41.117.455.909,00         | 89,14         |

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003**  
**(LANJUTAN)**

|    |   |                            |                            |                |
|----|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 26 | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan           | 17.671.609.216,00          | 17.172.995.474,00          | 97,18          |
| 27 | Belanja Tak Tersangka                             | 5.600.000.000,00           | 354.545.150,00             | 6,33           |
|    | <b>Jumlah Belanja Pelayanan Publik</b>            | <b>284.849.295.261,00</b>  | <b>252.400.520.295,50</b>  | <b>88,61</b>   |
| 28 | <b>JUMLAH BELANJA</b>                             | <b>347.658.963.383,00</b>  | <b>305.351.032.427,44</b>  | <b>87,83</b>   |
| 29 | <b>SURPLUS/ DEFISIT</b>                           | <b>(44.236.930.383,00)</b> | <b>33.279.729.226,70</b>   | <b>(75,23)</b> |
| 30 | <b>PEMBIAYAAN</b>                                 |                            |                            |                |
| 31 | <b>Penerimaan</b>                                 |                            |                            |                |
| 32 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu        | 57.869.791.627,00          | 57.456.145.471,67          | 99,29          |
| 33 | Transfer dari Dana Cadangan                       | -                          | -                          | 0,00           |
| 34 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi                  | -                          | -                          | 0,00           |
| 35 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan       | -                          | -                          | 0,00           |
| 36 | Hibah   | 10.769.529.417,00          | 10.769.529.417,00          | 100,00         |
| 37 | <b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>                   | <b>68.639.321.044,00</b>   | <b>68.225.674.888,67</b>   | <b>99,40</b>   |
| 38 | <b>Pengeluaran</b>                                |                            |                            |                |
| 39 | Transfer ke Dana Cadangan                         | 5.530.465.622,00           | 5.530.465.622,00           | 100,00         |
| 40 | Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | 1.032.395.622,00           | 1.000.431.870,30           | 96,90          |
| 41 | Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah           | 17.839.529.417,00          | 17.836.550.642,20          | 99,98          |
| 42 | Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan         | -                          | 77.137.955.980,87          | 0,00           |
| 43 | <b>Jumlah Pengeluaran</b>                         | <b>24.402.390.661,00</b>   | <b>101.505.404.115,37</b>  | <b>415,96</b>  |
| 44 | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>                          | <b>44.236.930.383,00</b>   | <b>(33.279.729.226,70)</b> | <b>(75,23)</b> |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**

| NO. | URAIAN  | APBD 2004                 |                           |               |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
|     |   | ANGGARAN<br>(Rp)          | REALISASI<br>(Rp)         | %             |
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>   |                           |                           |               |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                   |                           |                           |               |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah   | 38.149.900.000,00         | 40.581.980.256,00         | 106,38        |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                     | 18.269.452.000,00         | 18.995.046.383,00         | 103,97        |
| 5   | Pendapatan Hsl Prsh Milik Drh & Hsl Pengei Kekay Drh Yg Dipisah | 5.188.903.000,00          | 5.285.786.650,47          | 101,87        |
| 6   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                                | 8.803.826.000,00          | 15.048.605.811,35         | 170,93        |
| 7   | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                            | <b>70.412.081.000,00</b>  | <b>79.911.419.100,82</b>  | <b>113,49</b> |
| 8   | <b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>                              |                           |                           |               |
| 9   | Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak             | 29.583.201.000,00         | 37.889.440.614,00         | 128,08        |
| 10  | Dana Alokasi Umum   | 197.787.000.000,00        | 197.787.000.000,00        | 100,00        |
| 11  | Dana Alokasi Khusus   | 5.500.000.000,00          | 5.500.000.000,00          | 100,00        |
| 12  | Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi             | 19.520.000.000,00         | 28.791.189.586,69         | 147,50        |
| 13  | <b>Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan</b>                       | <b>252.390.201.000,00</b> | <b>269.967.630.200,69</b> | <b>106,96</b> |
| 14  | <b>PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH</b>                            |                           |                           |               |
| 15  | Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah            | 5.403.100.000,00          | 6.471.829.733,00          | 128,33        |
| 16  | Dana Penyesuaian Ad Hoc   | 13.299.000.000,00         | 13.299.000.000,00         | 100,00        |
| 17  | <b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>                     | <b>18.342.100.000,00</b>  | <b>19.770.829.733,00</b>  | <b>107,79</b> |
| 18  | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>341.144.382.000,00</b> | <b>369.649.879.034,51</b> | <b>108,36</b> |
| 19  | <b>BELANJA</b>  |                           |                           |               |
| 20  | <b>Belanja Aparatur Daerah</b>                                  |                           |                           |               |
| 21  | Belanja Administrasi Umum                                       | 32.042.509.295,00         | 29.273.749.713,29         | 91,36         |
| 22  | Belanja Operasi dan Pemeliharaan                                | 21.210.632.125,00         | 18.633.614.620,00         | 87,85         |
| 23  | Belanja Modal / Pembangunan                                     | 12.494.350.800,00         | 10.444.241.517,00         | 83,59         |
| 24  | <b>Jumlah Belanja Aparatur Daerah</b>                           | <b>65.747.492.220,00</b>  | <b>58.351.605.850,29</b>  | <b>88,75</b>  |

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**  
**(LANJUTAN)**

|    |  |                            |                           |               |
|----|--|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 25 | <b>Belanja Pelayanan Publik</b>                      |                            |                           |               |
| 26 | Belanja Administrasi Umum                            | 210.531.212.085,00         | 188.939.446.086,75        | 89,74         |
| 27 | Belanja Operasi dan Pemeliharaan                     | 38.887.655.965,00          | 36.817.724.255,00         | 94,68         |
| 28 | Belanja Modal / Pembangunan                          | 56.004.154.896,00          | 50.260.309.372,00         | 89,74         |
| 29 | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan              | 32.036.676.151,00          | 30.974.792.481,00         | 96,69         |
| 30 | Belanja Tak Tersangka                                | 12.000.000.000,00          | 4.996.667.725,00          | 41,64         |
|    | <b>Jumlah Belanja Pelayanan Publik</b>               | <b>349.459.699.097,00</b>  | <b>311.988.969.919,75</b> | <b>89,28</b>  |
| 31 | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                | <b>415.207.191.317,00</b>  | <b>370.340.575.770,04</b> | <b>89,19</b>  |
| 32 | <b>SURPLUS/ DEFISIT</b>                              | <b>(74.062.809.317,00)</b> | <b>(690.696.735,53)</b>   | <b>0,93</b>   |
| 33 | <b>PEMBIAYAAN</b>                                    |                            |                           |               |
| 34 | <b>Penerimaan Daerah</b>                             |                            |                           |               |
| 35 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu           | 77.898.420.898,00          | 77.137.955.980,87         | 99,02         |
| 36 | Transfer dari Dana Cadangan                          | 18.500.000.000,00          | 18.500.000.000,00         | 100,00        |
| 37 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi                     | -                          | -                         | -             |
| 38 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan          | -                          | -                         | -             |
| 39 | Hibah  | -                          | -                         | -             |
| 40 | <b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>                      | <b>96.398.420.898,00</b>   | <b>95.637.955.980,87</b>  | <b>99,21</b>  |
| 41 | <b>Pengeluaran Daerah</b>                            |                            |                           |               |
| 42 | Transfer ke Dana Cadangan                            | 11.267.142.598,00          | 11.267.142.598,00         | 100,00        |
| 43 | Penyertaan Modal                                     | 8.500.000.000,00           | 8.489.379.793,83          | 99,88         |
| 44 | Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo              | 2.568.468.983,00           | 2.568.468.983,00          | 100,00        |
| 45 | Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan            | -                          | 72.622.268.370,51         | -             |
| 46 | <b>Jumlah Pengeluaran</b>                            | <b>22.335.611.581,00</b>   | <b>94.947.259.245,34</b>  | <b>425,09</b> |
| 47 | <b>Surplus/ (Defisit)<br/>(Pendapatan - Belanja)</b> | <b>74.062.809.317,00</b>   | <b>690.696.735,53</b>     | <b>0,93</b>   |

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

